

The Institute
for Regional
Security

Menjaga Perdamaian dan Kesejahteraan di Kawasan Indo- Pasifik

Petunjuk Penelitian

Tulisan ini dibuat oleh Executive Officer (Direktur Utama) The Institute for Regional (Institut Keamanan Regional) untuk mengarahkan penelitian dan komunikasi saat ini di Institut.

Tujuan tulisan ini adalah untuk memastikan bahwa The Institute (Institut) melengkapi pekerjaan lembaga atau kelompok yang melakukan riset dan para komentator yang melakukan penelitian keamanan untuk rakyat di kawasan Indo-Pasifik – keamanan diartikan sebagai suatu tantangan yang saling berhubungan dan beragam dan mencakup keamanan militer, manusia, ekonomi dan lingkungan.

Tulisan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa pemahaman prioritas Institut untuk kawasan Indo-Pasifik nyata bagi lembaga lain dan untuk peneliti kebijakan dalam menyelesaikan tantangan dan prioritas tersebut, dan dengan siapa The Institute bisa bekerja sama dengan baik.

Chris Gardiner
Chief Executive Officer
Canberra
Juni 2023

Menjaga Perdamaian dan Kesejahteraan di Kawasan Indo-Pasifik

1. Penegasan ulang kebijakan Satu Tiongkok yang dijalankan oleh Negara di Kawasan.

Perdamaian dan kesejahteraan di kawasan Indo-Pasifik terancam dengan sengketa antara Republik Rakyat Tiongkok/ (PRC) dan Pemerintah Taiwan mengenai perluasan otoritas dan tata Kelola Taiwan oleh Pemerintah Tiongkok; berbahaya apabila Negara lainnya, termasuk Amerika Serikat dan Jepang, menjadi terlibat dalam perang di antara keduanya; dan seruan untuk merencanakan dan mempersiapkan perang tersebut.

Sebagian besar Negara di Kawasan ini pernah memiliki pertalian dengan Pemerintah Republik Tiongkok (ROC) di akhir Perang Dunia II. Pada saat Pemerintah itu dipaksa secara militer karena perang saudara untuk pindah ke Taiwan pada tahun 1949, banyak Negara di Kawasan ini mengambil kesempatan itu dan tetap mengambil kesempatan itu, dengan menyetujui kebijakan ‘Satu Tiongkok’ dan mengakui klaim kedaulatan PRC terhadap Taiwan, Pemerintah dan rakyat Taiwan tidak boleh digabungkan secara paksa ke dalam Tata Kelola PRC. Beberapa Negara telah menyatakan keinginannya untuk, atau kemungkinan bahwa mereka merasa dipaksa, untuk mendukung dan membela Taiwan dalam hal penggunaan kekuatan militer oleh PRC untuk mengambil alih pulau tersebut.

Negara di Kawasan harus memberi isyarat dengan jelas kepada Pemerintah Taiwan bahwa mereka tidak akan mendukung atau menyetujui deklarasi kemerdekaan dan tidak akan memberikan bantuan militer apabila Tiongkok merespons deklarasi tersebut dengan mengukuhkan secara paksa kedaulatannya

Negara di Kawasan, namun demikian, juga harus dengan jelas menegaskan dalam hubungan mereka dengan PRC risiko signifikan intervensi militer dari beberapa Negara dengan tautan sejarah, yang mendukung kepada Pemerintah Taiwan, sebagai tanggapan atas pemberlakuan militer aturan PRC selain deklarasi kemerdekaan. Negara di Kawasan ini harus mencari penegasan ulang Tiongkok tentang komitmennya untuk tidak memulai penggabungan Taiwan secara paksa, dan untuk bekerja sama dengan Pemerintah Taiwan untuk memajukan reunifikasi secara damai.

Semua pihak harus mencegah aktivitas militer di dalam dan di sekitar Taiwan yang tidak sesuai dengan kemajuan penyelesaian konflik secara damai antara Tiongkok dan Taiwan.

2. Penyelesaian sengketa perbatasan dan wilayah nonmiliter, termasuk non dan demiliterisasi wilayah yang diperebutkan, penggunaan arbitrase internasional, dan negosiasi kerangka kerja pengembangan bersama untuk kawasan tersebut.

Perdamaian dan kesejahteraan di kawasan Indo-Pasifik terancam oleh sikap tidak bersahabat pihak penuntut yang terlibat dalam sengketa perbatasan dan wilayah.

Daftar sengketa wilayah di Kawasan ini cukup panjang, dan sejarah dan klaim dalam sengketa tersebut diperdebatkan dan rumit. Di bagian timur Kawasan, mencakup Kepulauan Kuril; Kepulauan Senkaku/Diaoyu; Pulau Dokdo/Takeshima; Kepulauan Spratly; Kepulauan Paracel; dan, berdasarkan klaim rancangan Tiongkok yang dikenal dengan 'sembilan garis terputus', sebagian besar Laut Cina Selatan. Di bagian Barat, sengketa wilayah meliputi sengketa antara Tiongkok dan India di daerah Tibet-Arunachal Pradesh dan menyangkut Aksai Chin terus ke bagian barat sepanjang perbatasan India-Tiongkok; antara Bhutan dan Tiongkok menyangkut Doklam; dan antara India, Pakistan, dan Tiongkok menyangkut daerah Ladakh, dan perbatasan antara Ladakh dan Tiongkok. Di Samudra Hindia ada beberapa sengketa, termasuk antara Prancis, Madagaskar dan Komoro menyangkut banyak pulau, dan antara Britania Raya dan Mauritius menyangkut Kepulauan Chagos, yang melibatkan pangkalan militer khusus di Diego Garcia.

Sedikitnya ada tiga sengketa – sengketa antara Jepang dan Rusia menyangkut Kepulauan Kuril, sengketa antara Jepang dan Tiongkok menyangkut Kepulauan Diaoyu/Senkaku, dan sengketa antara Tiongkok dan Filipina menyangkut Kepulauan Spratly dan beting di Laut – dan dalam sengketa umum menyangkut klaim kedaulatan Tiongkok atas Laut Cina Selatan, Amerika Serikat dilibatkan dalam sengketa tersebut melalui aliansi pertahanan resmi dengan penuntut atau melalui tuntutan atas hak lintas laut di bawah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS).

Prinsip-prinsip yang dihormati di semua sengketa tersebut adalah kesetaraan di bawah hukum internasional Negara yang terlibat dan penyelesaian klaim secara damai. Ini tidak berarti bahwa pihak yang lebih kuat dalam sengketa tersebut melakukan apa yang mungkin, termasuk membentuk secara militer 'data di lapangan' atau 'realitas wilayah baru' yang dibentuk dari kekuatan senjata, dan pihak yang lebih lemah dipaksa untuk menerima yang harus dilakukan. Ketika akses sumber daya alam sering menjadi masalah utama dalam sengketa, pengembangan sumber daya ekonomi bersama dalam wilayah yang diperebutkan harus diterima sebagai prinsip ketiga yang mengatur negosiasi klaim antar Negara.

Negara di Kawasan memiliki komitmen untuk:

- Menyatakan komitmen terhadap tiga prinsip di atas: kesetaraan, penyelesaian secara damai, dan perkembangan ekonomi bersama.
- Mendorong prinsip-prinsip ini di dalam negeri untuk membangun dukungan nasional yang dikenal dalam penyelesaian sengketa secara damai melalui kompromi potensial.

- Berkomitmen terhadap zona demiliterisasi mengenai perbatasan dan pemerintahan non militer dan keberadaan dalam wilayah.
- Penggunaan arbitrase internasional jika masalahnya mungkin diputuskan oleh undang-undang atau dari konsiliasi pihak ketiga jika masalahnya kemungkinan harus diputuskan sesuai dengan apa yang dianggap benar dan baik.

Masa depan yang diidentifikasi dengan multipolaritas seputar kekuatan besar Tiongkok, India dan Amerika Serikat, Negara Di Kawasan harus mendukung pembentukan dialog strategis trilateral antara ketiga kekuatan besar ini yang difokuskan pada manajemen dan penyelesaian sengketa wilayah di Kawasan.

3. Dukungan terhadap upaya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk melakukan negosiasi ‘kode etik’ yang efektif untuk Laut Cina Selatan.

Perdamaian dan kesejahteraan di Kawasan Indo-Pasifik terancam karena kurangnya kode etik, aturan keterlibatan yang disepakati dan mekanisme yang disepakati untuk mengelola peningkatan jika terjadi perselisihan menyangkut perbatasan yang disengketakan dan di wilayah yang disengketakan.

Selama masa penyelesaian klaim dan sengketa wilayah, demi kepentingan semua negara di Kawasan, maka pihak yang bersengketa mengurangi risiko dari tindakan unit militer yang tidak diinginkan atau peningkatan menjadi konflik umum.

ASEAN saat ini berpartisipasi dalam negosiasi dengan Tiongkok untuk menetapkan ‘kode etik’ untuk Laut Cina Selatan. Proses ini dan kepemimpinan ASEAN harus didukung secara aktif, agar Kode Etik tersebut disahkan dan bisa diterapkan pada tahun 2024.

Deklarasi Tata Perilaku 2002 yang tidak mengikat sebelumnya yang disepakati oleh ASEAN dan Tiongkok, sayangnya, sudah terbukti tidak efektif, terutama mengenai komitmen untuk mencegah tindakan menguasai ‘pulau, koral, beting, pulau karang dan fitur lainnya tak berpenghuni’ di Laut.

Negara di Kawasan harus mendukung upaya ASEAN untuk mendasari Kode yang dapat dilaksanakan tentang negosiasi dan perjanjian multilateral, dan kode yang sangat sesuai dengan ketentuan UNCLOS. Keinginan Tiongkok untuk menerima dan terikat dengan proses tersebut dan menerapkan Kode yang akan diawasi dengan ketat oleh Negara di Kawasan untuk menilai karakternya dan kemungkinan perilaku sebagai suatu kekuatan besar yang diakui di Kawasan dan menetapkan apakah kepercayaan dalam diplomasi yang berkaitan dengan kekuatan itu.

4. Kerangka kerja regional untuk mengelola proliferasi senjata.

Perdamaian dan kesejahteraan di Kawasan Indo-Pasifik terancam dengan perlombaan senjata di seluruh Kawasan atau sebagian kawasan, yang menyangkut peningkatan anggaran militer dan peningkatan jangkauan, kekuasaan dan persenjataan canggih.

Faktor utama dalam kenaikan anggaran militer di Kawasan adalah:

- Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh Negara di Kawasan, sehingga memberi mereka peluang untuk meningkatkan investasi dalam kemampuan pertahanan mereka;
- Munculnya Tiongkok sebagai kekuatan besar dalam investasi militer yang melebihi semua Negara lainnya (tidak termasuk Amerika Serikat); dan
- Kebutuhan untuk mengelola perselisihan dan peningkatan militer dalam sengketa wilayah dan aksi 'zona abu-abu' tentang persyaratan setara dengan Negara mana pun yang terlibat.

Ada risiko eksistensial dari proliferasi senjata nuklir selanjutnya di Kawasan. Faktor utama dalam penggunaan potensi senjata nuklir adalah:

- Perkembangan senjata nuklir dan sistem penyampaian peluru kendali balistik oleh Korea Utara, dan ancaman yang digunakan untuk melawan negara tetangganya dan aliansi mereka;
- Perluasan kemampuan nuklir Tiongkok secara terus menerus, bertujuan untuk menyamai kemampuan India, Rusia, dan Amerika Serikat dan menyeimbangkan perang nuklir, dan kurangnya perjanjian senjata di antaranya dan kekuatan nuklir lainnya; dan
- Kemungkinan hilangnya 'pencegahan perluasan nuklir' yang diberikan oleh Amerika Serikat dan kebutuhan yang dirasakan untuk pencegahan independen jika Amerika Serikat tidak bersedia atau tidak dapat memberikan kekuatan imbalan di Kawasan ini.

Terakhir, ada perlombaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedang berlangsung, tingkat internasional, tentang senjata mandiri dan kecerdasan buatan, yang mengangkat masalah-masalah terkait kapasitas manusia sebagai kontrol dalam pengambilan keputusan dan mengelola peningkatan konflik senjata di masa depan.

Upaya diplomasi harus dilakukan:

- Oleh Tiongkok, untuk meyakinkan, dan jika perlu, menekan, Korea Utara untuk melakukan denuklirisasi, termasuk dengan menegaskan kembali bahwa pencegahan perluasan Tiongkok menghentikan kebutuhan Korea Utara akan senjata nuklir, dan Tiongkok sepenuhnya mendukung sanksi internasional terhadap negara yang tidak melakukan denuklirisasi.

- Oleh Amerika Serikat untuk terus meyakinkan aliansinya akan komitmen pencegahan perluasan yang berkelanjutan dan efektif pada mereka.
- Oleh Negara di Kawasan untuk menetapkan kerangka kerja dan proses dialog – mungkin di bawah kepemimpinan ASEAN atau inisiatif seperti Konferensi tentang Interaksi dan Tindakan Membangun Keyakinan di Asia (CICA) – untuk transparansi dan membangun kepercayaan diri mengenai anggaran pertahanan; kemampuan dan doktrin militer; keamanan internasional; aturan keterlibatan; dan teknologi modern yang menggunakan AI dan sistem mandiri.

5. Peningkatan kerja sama dan koordinasi dalam lembaga dan arsitektur ekonomi Regional seperti Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB), Bank Pembangunan Asia (ADB), Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) dan Kerangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik (IPEF) untuk menyelesaikan keamanan manusia, ekonomi, dan lingkungan, termasuk ketahanan pangan dan air serta perubahan iklim.

Perdamaian dan kesejahteraan di Kawasan Indo-Pasifik terancam oleh kemiskinan berkelanjutan; kurangnya perkembangan ekonomi; dampak perubahan iklim, dan kerawanan pangan dan air, yang kemungkinan bisa diperburuk dengan perubahan iklim; dan ketidakstabilan dan ketidakamanan sosial yang luas.

Banyak rakyat di Kawasan Indo-Pasifik tidak cukup mendapat kebutuhan dasar hidup atau tidak mempunyai keamanan ekonomi yang menjamin akses kebutuhan dasar seperti – makanan, tempat tinggal, pekerjaan, layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan dari kejahatan.

Keresahan dalam ekonomi harus menjadi prioritas dari kewajiban bersama untuk menjaga martabat dan kebebasan manusia, tetapi juga mengalahkan kohesi sosial di seluruh Kawasan. Keresahan dalam ekonomi merupakan faktor utama dalam pertumbuhan ekstremisme dan pada gilirannya dalam komunitas di kalangan populis dan pimpinan politik yang otoriter.

Negara secara hukum bertindak untuk mengamankan akses sumber daya yang mereka butuhkan untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya menghadapi kemiskinan dan keresahan. Persaingan terhadap sumber daya ekonomi menjadi faktor dalam konflik antar negara dan, misalnya, menjadi salah satu faktor yang mendasari persaingan dalam kedaulatan kelautan di Laut Cina Selatan.

Lembaga dan perjanjian multilateral bertujuan untuk mendorong perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan, dan Negara di Kawasan memiliki komitmen pada

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (SDG). Negara di Kawasan harus:

- Meninjau agenda dari dan untuk lembaga dan perjanjian ini sehingga memperkuat alokasi sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi komitmen SDG; dan
- Dalam hal negara berkembang, mempromosikan di dalam negeri hal mempertahankan dan meningkatkan bantuan pembangunan ke dalam Kawasan sebagai sarana yang diperlukan untuk menjaga perdamaian dan kesejahteraan bersama.

6. Usaha kolaboratif, termasuk pelaksanaan dan protokol dan tindakan sanksi, untuk menyelesaikan kejahatan transnasional, yang berkaitan dengan perdagangan manusia, perbudakan seksual dan kekerasan seksual; eksploitasi sumber daya alam termasuk penangkapan ikan secara ilegal, yang tidak pernah dilaporkan, dan tidak sah; perdagangan satwa liar dan tanaman secara ilegal; dan pengedaran narkoba.

Perdamaian dan kesejahteraan di Kawasan Indo-Pasifik terancam oleh organisasi kriminal dan di beberapa kasus, Negara terlibat dalam kegiatan kriminal, sehingga melanggar keamanan manusia, ekonomi dan lingkungan.

Sebagai satu contoh dengan beberapa domain, keamanan pangan dan akses protein saat ini dan akan terus menjadi masalah utama di Kawasan. Satu grup Negara Di Kawasan, Negara Kepulauan Pasifik, sangat bergantung pada sumber daya penangkapan ikan di Zona Eksklusif Ekonomi mereka, tidak hanya sebagai pangan tetapi juga untuk pendapatan nasional. Eksploitasi perikanan keberlanjutan juga menjadi pertimbangan penting dalam manajemen keamanan lingkungan global.

Armada penangkapan ikan yang termasuk dalam kegiatan IUU memberikan ancaman bagi kedaulatan beberapa negara serta kesejahteraan mereka dan memberikan ancaman bagi manajemen Samudra dan laut bersama, adil dan berkelanjutan di Kawasan.

Negara di Kawasan harus memperkuat kolaborasi di bawah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, dan Rencana Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penangkapan Ikan Secara Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Sah (IUU), membangun, dan memperkuat kecerdasan bersama, kesadaran domain, larangan, dan sanksi hukum, perjanjian, dan kemampuan operasional.

7. Perjanjian Negosiasi tentang identifikasi dan batasan pembatasan perdagangan untuk teknologi dan investasi yang mempengaruhi keamanan nasional Negara.

Perdamaian dan kesejahteraan di Kawasan Indo-Pasifik terancam oleh penghalang yang tidak perlu untuk perdagangan dan oleh dampak dari hubungan antar negara dari pemberlakuan investasi dan pembatasan perdagangan tentang teknologi, sumber daya, atau sektor tertentu.

Semua Negara berhak untuk membatasi akses dan kontrol dalam ekonomi dan masyarakat mereka yang dianggap sesuai dengan keamanan nasional atau kemampuan pertahanan kedaulatan. Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT) Pasal 21 yang secara khusus mengakui hak ini.

Perdagangan bebas dan terbuka telah dan akan terus menjadi penting terhadap perkembangan ekonomi untuk rakyat di Kawasan. Banyak rakyat masih menantikan manfaat dari pertumbuhan ekonomi, yang digerakkan dari pasar global terbuka.

Keputusan terbaru di sejumlah Negara telah menyorot ketegangan, namun, antara komitmen pada sistem perdagangan regional dan global yang bebas dan terbuka begitu penting bagi kesejahteraan dan tindakan untuk melarang perdagangan dan investasi, atau untuk membatasi perdagangan dan investasi ke aliansi, untuk teknologi, investasi dan sektor tertentu. Bidang teknologi maju, sistem digital, dan materi penting yang diperlukan untuk keduanya menjadi inti dari keputusan tersebut.

Keputusan tersebut harus dibuat secara transparan, dengan kriteria yang jelas, dan konsisten, disertai usaha untuk memastikan identifikasi bidang batasan tidak menempatkan risiko pada hubungan perdagangan umum atau berkontribusi pada keterlepasan ekonomi yang lebih luas dan pembentukan blok ekonomi yang membatasi kesejahteraan.

8. Kerangka kerja regional dan sumber daya untuk penelitian, perencanaan, latihan, dan kegiatan pandemi bersama.

Perdamaian dan kesejahteraan di Kawasan Indo Pasifik telah terancam oleh pandemi Covid-19 dan berisiko dari pandemi di masa depan.

Covid-19 mengungkapkan bagaimana orang dan keamanan mereka saling berhubungan dalam dunia di mana pergerakan orang dan produk, serta virus mudah dan cepat, di seluruh kawasan. Dampak ekonomi Covid-19 tentang keamanan ekonomi ratusan juta telah dan tetap penting.

Negara harus memperkuat dukungan mereka terhadap inisiatif dan entitas seperti Koalisi untuk Inovasi Kesiapsiagaan Pandemi (CEPI). Negara harus menyempurnakan

investasi pada vaksin dan penanggulangan biologis terhadap epidemi disertai dengan kolaborasi dalam kesiapsiagaan, manajemen krisis dan respons dan pemulihan seluruh masyarakat.

Demikian pula, Negara berpartisipasi dari waktu ke waktu dalam latihan militer besar bersama untuk mempersiapkan perang dan interoperabilitas dalam perang, Negara harus menjelajahi kerja sama dalam mencontohkan dan mendorong respons dan pemulihan pandemi. Latihan tentang antisipasi risiko dan kemampuan respons perlu memasukkan kerja sama antarlembaga di seluruh perbatasan departemental dan Negara, dan melibatkan kesehatan, penelitian, perbendaharaan, pengawasan perbatasan, transportasi, pemolisian, pertahanan, dan komunikasi pemerintah dan pengambil keputusan, di tingkat senior.

9. Kerangka kerja Regional dan sumber daya untuk perencanaan, latihan, dan kegiatan Bantuan Kemanusiaan dan Penanggulangan Bencana (HADR) bersama.

Perdamaian dan kesejahteraan di Kawasan Indo-Pasifik terancam oleh bencana manusia dan bencana alam, dengan kata lain bisa menjadi frekuensi dan konsekuensi yang lebih besar sebagai dampak perubahan iklim di Kawasan.

Selain itu, untuk menggunakan sesuatu yang bisa dijadikan contoh dari latihan militer bersama yang diinvestasi oleh begitu banyak Negara, Negara harus meningkatkan kolaborasi dalam perencanaan dan pelaksanaan latihan dalam kesiapsiagaan untuk bencana manusia dan bencana alam yang besar. Pengenalan lebih dahulu terhadap aset, struktur perintah, panduan mobilisasi dan operasional memudahkan penyebaran aset dan personel yang cepat, efektif, dan berkelanjutan serta latihan rutin berdasarkan pemodelan dan perencanaan awal, harus dilakukan.

Untuk memberikan dampak pada komitmen tersebut, dan sebagai bagian perkembangan kepercayaan diri Regional, Negara harus mempertimbangkan perjanjian Regional, atau pakta pertahanan, yang diterapkan dan mengawasi perencanaan, latihan, dan respons HADR bersama, dan tentu saja perencanaan dan respons pandemi.

10. Investasi dalam diplomasi trek 1.5 untuk mengatur dan memperkuat kebijakan dan komunikasi dan pemahaman pembuat keputusan di seluruh Kawasan.

Perdamaian dan kesejahteraan di wilayah Indo-Pasifik akan diperkuat oleh keterlibatan dan pemahaman yang rutin dan mendalam antara kebijakan senior dan pengambil keputusan di Negara di seluruh Kawasan.

Pemerintah mengandalkan pembuat kebijakan dan pimpinan departemen mereka untuk membawa pandangan dan ide dan menerapkan kebijakan secara operasional. Pembuat kebijakan dan pembuat keputusan itu bisa menjadi sangat penting untuk cara dan apa yang pemerintah lihat dan pikirkan, dan sangat penting untuk bagaimana Negara bekerja sama sehari-hari dengan Negara lainnya.

Diplomasi Trek 1.5 – fasilitasi kebijakan senior dan pembuat keputusan dalam hal memberi informasi dan menjalankan Pemerintah – dapat membangun pemahaman, hubungan, kepercayaan, dan saluran komunikasi yang diperlukan untuk mencegah dan mengelola krisis. Mereka dapat menunjukkan pembuat kebijakan dan pembuat keputusan cara berpikir dan pandangan ‘asing’ sehingga meningkatkan kesadaran sejarah dan yang berubah. Mereka dapat membuat proposal yang bisa dilonggarkan dan dikritik sesering mungkin yang tidak mungkin untuk pimpinan politik Pemerintah.

Banyak dari apa yang disarankan dalam pernyataan ini perlu dikembangkan dan kemungkinan yang berubah dilakukan melalui pembuat kebijakan senior dan pembuat keputusan sebelum dipertimbangkan untuk disetujui untuk sumber daya oleh pimpinan politik Pemerintah. Negara harus meletakkan perencanaan strategis dan mendukung diplomasi Trek 1 dengan kegiatan Trek 1.5 yang teratur, dengan persiapan, menengahi dan tersusun dengan baik, dengan memberdayakan pejabat senior mereka untuk fokus pada menjaga perdamaian dan kesejahteraan semua rakyat di Kawasan Indo-Pasifik.

Tema Penelitian Utama Yang Muncul

1. Bagaimana tiga kekuatan besar di Kawasan – Tiongkok, India, dan Amerika Serikat – bisa menjadi struktur terbaik dan mengelola hubungan mereka di wilayah tersebut?
2. Struktur dan mekanisme diplomasi dan tata kelola apa yang bisa digunakan untuk membentuk transparansi dan pengembangan kepercayaan diri berkaitan dengan anggaran pertahanan, proliferasi senjata, postur militer, dan perkembangan dalam aplikasi AI militer?
3. Mekanisme penyelesaian dan pendekatan sengketa apa untuk perkembangan sumber daya bersama yang dapat diterapkan agar berhasil mengelola dan menyelesaikan sengketa di kawasan Indo-Pasifik?
4. Bagaimana kebijakan, strategi dan praktik diplomasi dapat memperkuat Forum Kepulauan Pasifik (PIF), Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Asosiasi Kerja Sama Regional Asia Selatan (SAARC), Sistem Perjanjian Antartika dan multilateralisme di Kawasan?
5. Bagaimana entitas regional seperti AIIB dan ADB bisa terstruktur, terkoordinasi dengan lebih baik dan mungkin dirasionalkan untuk mendorong keamanan ekonomi, kemanusiaan, dan lingkungan di seluruh Kawasan?
6. Bagaimana masalah keamanan nasional bisa dikelola dengan lebih baik terkait teknologi maju dan sumber daya penting untuk membatasi pembatasan perdagangan terhadap kriteria keamanan yang disepakati dan untuk memastikan perdagangan yang bebas dan terbuka secara maksimum di antara negara di Kawasan?
7. Bagaimana negara bisa memperbaiki dan mengatur penelitian, perencanaan, latihan dan kegiatan bersama untuk pandemi dan untuk HADR di Kawasan?

The Institute for Regional Security

info@ifrs.org.au

Level 4
42 Macquarie Street
Barton ACT 2600

PO Box 4060
Kingston ACT 2604

regionalsecurity.org.au

